

'ANIES SEGERA JADI TERSANGKA KORUPSI'

SOAL KICAUAN DENNY, NASDEM PERCAYA KPK

Denny Indrayana kembali mengungkapkan informasi yang didapatnya. Kali ini terkait Anies Baswedan dan kasus di KPK. Dalam keterangan tertulisnya, Denny menyinggung soal cawe-cawe Jokowi menjegal Anies. Bahkan keterangan tertulisnya, yang juga diupload di media sosial, diberi judul 'Anies segera jadi tersangka korupsi di KPK'. Ia pun pernah menyinggungnya dalam tulisan, "Bagaimana Jokowi Mendukung Ganjar, Mencadangkan Prabowo, dan Menolak Anies bahwa Jokowi menggunakan 9 strategi 10 sempurna. Bahkan, Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) ini menyebut sudah ada 19 kali ekspose Formula E guna jerat Anies. Namun, NasDem sebagai pengusung utama Anies sebagai Capres mengaku masih percaya dengan proses hukum yang berlangsung di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi anti-rasuah sendiri menegaskan, penanganan kasus Formula E masih dalam tahap penyelidikan. Sebelumnya Denny juga membuat gaduh dengan menyebar kabar terkait MK yang bakal memutuskan sistem Pemilu tertutup. Namun pada akhirnya tidak terbukti kebenarannya, karena di 2024 tetap resmi menggunakan proporsional terbuka.

(Baca Hal 11)

9 STRATEGI 10 SEMPURNA JOKOWI MENURUT KETERANGAN DENNY:

- PERTAMA**, di tahap awal, Presiden Jokowi dan lingkaran dalamnya mempertimbangkan opsi untuk menunda pemilu, sekaligus memperpanjang masa jabatan Presiden.
- KEDUA**, masih di tahap awal, segaris dengan strategi penundaan pemilu, sempat muncul ide untuk mengubah konstitusi guna memungkinkan Presiden Jokowi menjabat lebih dari dua periode.
- KETIGA**, menguasai dan menggunakan KPK untuk merangkul kawan dan memukul lawan politik.

- EMPAT**, menggunakan dan memanfaatkan kasus hukum sebagai *Political Bargaining* yang memaksa arah parpol dalam pembentukan koalisi pilpres.
- LIMA**, jika ada petinggi parpol yang keluar dari strategi kemenangan, maka dia berisiko dicopot dari posisinya.
- ENAM**, menyiapkan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi untukantisipasi dan memenangkan sengketa hasil Pilpres 2024.

- TUJUH**, adalah tidak cukup hanya mendukung pencapresan Ganjar Pranowo, Jokowi juga memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto.
- DELAPAN**, Jokowi adalah membuka opsi mentersangkakan Anies Baswedan di KPK. Ini sudah menjadi rahasia umum, terkait dugaan korupsi Formula E.
- SEMBILAN**, adalah mengambil alih Partai Demokrat melalui langkah politik yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Government (Hal.2)
Sebut Ujian SIM Seperti Pemain Sirkus Kapolri Beri Waktu Sebulan Studi Banding dan Evaluasi

SEPULUH, yang menyempurnakan adalah dengan berbohong kepada publik. Presiden Jokowi berulang kali mengatakan urusan capres adalah kerja para Ketum Parpol, bukan urusan Presiden. Belakangan, baru Beliau akui akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024.

Sebut Ujian SIM Seperti Pemain Sirkus Kapolri Beri Waktu Sebulan Studi Banding dan Evaluasi

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berbicara terkait masalah pembuatan SIM di Indonesia. Dia memberi waktu studi banding dan evaluasi sebulan agar dipermudah. Sebab saat ini ujian praktik SIM dinilai seperti 'pemain sirkus'.

Masalah pembuatan SIM saat ini mendapat sorotan setelah Polri mengeluarkan persyaratan baru dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM). Syarat barunya, pemohon SIM perlu melampirkan bukti sertifikat mengemudi yang didapat dari lembaga pendidikan mengemudi.

Jenderal Sigit mengatakan, pada dasarnya, pembuatan SIM di Indonesia masih cukup sulit. Selain itu, masih banyak laporan dan keluhan dari masyarakat betapa buruknya pelayanan pembuatan SIM.

"Kita ingin tahu apa yang menyebabkan apa yang membuat kita kurang bagus. Kalau kita lihat, pembuatan SIM juga masih sulit. laporan kasus juga sama, balik nama kendaraan dan seterusnya dan tentunya ya kita akan selalu lakukan perbaikan," kata Sigit saat memberikan arahan kepada para wisudawan dan wisudawati di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian 2023 pada Rabu (21/6/2023).

Eks Kapolda Banten ini mengatakan, dirinya sudah memerintahkan kepada Kakorlantas Irjen Firman Shantyabudi untuk melakukan evaluasi. Termasuk digitalisasi pembuatan SIM. "Perbaikan yang awalnya manual menjadi digitalisasi sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan dengan aplikasi yang sedang kita siapkan," ucap Sigit.

"Kita akan satukan semua layanan di satu aplikasi namanya superAPP dan khusus untuk pembuatan SIM, saya minta Kakorlantas untuk melakukan perbaikan," kata Sigit. "Yang namanya angka 8 itu masih sesuai atau tidak, yang melewati zig zag itu sesuai atau tidak, kalau sudah tidak relevan tolong diperbaiki," ucap dia.

Eks Kabareskrim ini menjelaskan, Polri ingin masyarakat yang mempunyai SIM adalah mereka yang bisa menghargai para pengguna jalan lain. "Yang penting adalah bagaimana dia menghargai keselamatan para pengguna jalan dan bagaimana dia memiliki keterampilan saat mengendarai kendaraannya," ucap Sigit.

"Jangan terkesan bahwa pembuatan ujiannya khususnya praktik ini hanya untuk mempersulit dan ujung-ujungnya di bawah meja, enggak tes, malah lulus, ini harus dihilangkan," ucap dia.

Jenderal bintang 4 itu memberikan waktu ke Korlantas Polri 1 bulan untuk memperbaiki ujian SIM. "Jadi saya minta studi banding segera, kalau bisa satu bulan ini ujian praktik SIM dipermudah, disesuaikan," ujarnya.



Seorang pemohon surat izin mengemudi (SIM) mengikuti tes berkendara di Satpas SIM, Banten. (dok.ant)

Lebih jauh, Sigit mengatakan, dirinya sudah pernah meninjau bagaimana proses pembuatan SIM di beberapa tempat. Menurutnya, jika masih menggunakan metode seperti ini, hanya sedikit orang yang bisa mendapatkan SIM.

"Kita kalau saya uji dengan tes ini dari 200 yang lulus paling 20. Bener nggak? nggak percaya? Kalian langsung saya bawa ke Daan Mogot langsung saya uji. Ya, karena kalau yang lolos dari situ, nanti pasti bisa jadi pemain sirkus," ucap Sigit.

"Ini hal-hal yang begitu diperbaiki jadi hakikat yang ingin kita dapat dari seorang pengendara tanpa harus melakukan hal yang sangat sulit," ucap dia.

Terkait hal tersebut, Direktur Regident Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap praktik ujian SIM. "Gini, maksud Pak Kapolri itu kan dipermudah masyarakat. Kita akan evaluasi," kata Yusri, Rabu (21/6/2023).

Yusri menuturkan, evaluasi praktik ujian SIM akan dilakukan dengan tetap berpedoman pada undang-undang. Namun dengan tidak mengesampingkan keinginan masyarakat. "Arahan Pak Kapolri kan ingin meringankan masyarakat, tapi tidak keluar dari aturannya. Begitu," ujarnya. Yusri menyebut, dalam melakukan evaluasi mereka juga akan bersumber pada data litbang Korlantas. "Semua harus lewat kajian lewat litbang data. Baru kita putuskan seperti apa," pungkasnya.

Sertifikat Mengemudi Bak 'Legalkan' Pungli

Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto mengusulkan agar biaya pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) digratiskan. Hal ini menyusul aturan terkait kewajiban sertifikat mengemudi sebagai syarat bagi pembuatan SIM. "Kalau prasyarat

sertifikat mengemudi itu tetap dipaksakan, harusnya publik mendapat kompensasi dengan menggratiskan biaya SIM," kata Bambang.

Menurut Bambang, aturan mewajibkan sertifikat mengemudi itu sekilas adalah langkah bagus. Hanya saja, akan memperbanyak pos dan melegalkan pungutan liar (pungli) dengan perantara pihak ketiga bila tidak dicermati. "Problemnya siapa yang memberikan izin lembaga kursusnya? Izin lembaga ini tentu tidak gratis dan ujung-ujungnya adalah kepolisian lagi," lanjut Bambang.

Bambang mengatakan publik akan dikenai biaya tambahan kursus yang tentu tak murah di luar biaya SIM. Padahal, semua pungutan pada masyarakat harusnya melalui kesepakatan pemerintah dan DPR.

Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Beleid itu menyebutkan segala pungutan yang dibebankan kepada rakyat harus seizin Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Tidak bisa kepolisian membuat syarat layanan publik dengan memungut biaya sendiri tanpa landasan aturan terkait pungutan biaya," ungkap dia.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan, sertifikat mengemudi tersebut menjadi bukti kalau pembuat SIM sudah belajar kendaraan terlebih dahulu melalui sekolah mengemudi.

"Dia harus sudah memiliki keahlian, karena kalau ujian itu kan hanya menguji saja, tapi keahlian ini sebetulnya sudah mereka siapkan," kata Latif.

Hal senada juga disampaikan Kasubdit SIM Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Ditregident) Korlantas Polri Kombes Polisi Tri Julianto Djatiutomo. Ia berujar

kemampuan mengemudikan kendaraan bermotor, pengetahuan, wawasan berlalu lintas dan etika berkendara merupakan faktor penting bagi keamanan, keselamatan, ketertiban maupun kelancaran lalu lintas. "Kemampuan, pengetahuan, wawasan, dan etika tersebut dapat dikembangkan melalui sebuah proses pelatihan kepada masyarakat calon pemohon penerbitan SIM," ujarnya. (wid,rls,ant/dya)

KRITERIA YANG WAJIB DIPENUHI LEMBAGA SEKOLAH MENGENGUDI TERSEBUT:

- Persyaratan administrasi kelembagaan
- Sarana dan prasarana pendidikan dan latihan, termasuk sirkuit latihan dan kendaraan latihan
- Sumber daya manusia termasuk para instruktur yang berkompeten dan bersertifikat cukup
- Materi pendidikan dan pelatihan, setidaknya meliputi pengetahuan dasar aspek teknis kendaraan
- Pengetahuan tentang Undang-Undang Lalu Lintas, peraturan, rambu dan marka jalan
- Pemahaman tentang persepsi bahaya serta tata cara defensive driving
- Etika berkendara
- Latihan untuk persiapan mengikuti Uji Teori dan Uji Praktik SIM

ATURAN WAJIB SERTIFIKAT MENGENGUDI

- Peraturan Kapolri (Perpol) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM. Baca Pasal 9 ayat (1) angka 3 Perpol tersebut mengatur, pemohon wajib melampirkan fotokopi beserta memperlihatkan sertifikat asli pelatihan mengemudi dari lembaga terakreditasi.



Beri Batas Sepekan soal Akses Silon Bawaslu Ancam Laporkan KPU ke DKPP

JAKARTA-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyurati Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait keterbukaan aplikasi sistem informasi pencalonan (Silon). Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengatakan pihaknya memberikan ultimatum jika KPU tak merespons surat itu dalam pekan ini, dengan melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Diketahui ini merupakan surat keempat yang Bawaslu layangkan ke KPU. Tiga surat sebelumnya tidak mendapatkan balasan. "Dua atau tiga kali kami mengirim surat untuk kemudian Silon itu terbuka, kami ya, kami kan sama-sama penyelenggara apa gitu. Jangan ada dusta di antara kita," kata Bagja di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (21/6/2023).

"Sekarang surat terakhir nih, jika surat kami nggak berbalas tentu ada berbalas yang lain," sambungnya. Bagja menekankan jika pada pekan ini surat mereka tak berbalas, maka Bawaslu akan melapor ke DKPP. Bagja berharap KPU dapat memberikan akses Silon sepenuhnya.

"Oh iya kan kita harus ngobrol dulu dengan teman-teman kesepakatan di pleno begitu. Di DKPP kan nggak ya

kami, dibuka aja sih," ungkap dia. Sebelumnya, Bagja sudah menyebut Silon masih menjadi kendala bagi mereka. Selaku pengawas penyelenggara pemilu, Bawaslu masih mendapat akses yang terbatas sama seperti halnya partai politik (parpol) peserta pemilu.

"Aksesnya 15 menit masuk, 15 menit keluar, sama seperti parpol. Akses gimana pertanyaannya itu kita awasi," kata Bagja, Senin (12/6/2023).

Hal ini bakal berdampak untuk Bawaslu dalam mengumpulkan bukti jika ada indikasi kecurangan. Sebab, dalam akses Silon yang sebentar itu, Bawaslu hanya diperbolehkan untuk melihat saja. Pihaknya dilarang untuk misalnya megambil gambar atau melakukan proses tangkap layar terhadap data Silon yang terindikasi palsu.

"Anda boleh melihat tapi tidak boleh mefoto. Kalau ada indikasi ijazah palsu, cuma lihat begini saja, gimana alat bukti yang mau disampaikan," tuturnya. Padahal, dalam proses pengawasan terkait indikasi adanya kecurangan yang dilakukan oleh bacaleg, Bawaslu perlu memeriksa banyak dokumen dan menyimpannya sebagai bukti

Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menyebut pihaknya telah memberikan akses aplikasi tersebut kepada Bawaslu. "Kami sudah memberikan akses Silon kepada Bawaslu RI," kata Hasyim kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Meski demikian, kata Hasyim, KPU tidak dapat memberikan data mengenai setiap calon anggota legislatif (caleg) secara lengkap kepada Bawaslu. Karena menurutnya, terdapat sebagian informasi yang dikecualikan untuk dibagikan sebagaimana diatur Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Nurut Hasyim, Pasal 17 huruf g UU Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa informasi yang dikecualikan termasuk informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi terdiri atas riwayat dan kondisi anggota keluarga; riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; dan/atau kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang. Ada pula informasi mengenai hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal.

Pasal 18 mengatur bahwa informasi yang dapat dipublikasikan adalah putusan badan peradilan; ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, atau bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum; surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan; rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum; dan laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum.



Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (mengangkat tangan) saat memberikan penjelasan isu-isu strategis tentang Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. (dok)

dan/atau kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.

Lalu, kata Hasyim, ada pula informasi mengenai hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal.

Kemudian, Pasal 18 mengatur bahwa informasi yang dapat dipublikasikan adalah putusan badan peradilan; ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, atau bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum; surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan; rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum; dan laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum.

Terkait dengan keterbatasan itu, Hasyim menyampaikan KPU memberikan kesempatan kepada Bawaslu untuk mengecek data caleg secara lengkap dengan mendatangi tempat verifikasi KPU secara langsung. "Kalau Bawaslu tetap ingin melihat, bisa melakukan pengecekan langsung dengan mendatangi tempat verifikasi KPU," ujar Hasyim.

Polri Juga Warning KPU

Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mewanti-wanti KPU agar melakukan persiapan maksimal jelang pemilu serentak pada 14 Februari 2024. Sigit mengatakan, KPU mempunyai pengalaman buruk di Pemilu 2019 saat ratusan petugas KPPS termasuk beberapa di antaranya anggota Polri, meninggal.

"Kita masih ingat tahun 2019, 5.175 petugas TPS sakit, 894 meninggal, termasuk di dalamnya ada anggota kita," kata Sigit memberikan arahan kepada para kepada para wisudawan dan wisudawati di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian 2023 di Jakarta, Rabu (21/6/2023).

"Jadi tentunya tahun ini kalau enggak dipersiapkan dengan baik, dan ini selalu saya ingatkan ke teman-teman kita di KPU, tolong persiapkan tugasnya betul-betul yang kesehatannya memenuhi syarat sehingga tidak menimbulkan masalah," kata Sigit.

Sigit menjelaskan, jika KPU tidak mengantisipasi masalah ini, sudah dipastikan Pemilu 2024 tidak akan berjalan dengan lancar. "Karena pada saat petugas ada masalah, tahapan dilaksanakan, maka kecenderungan terjadi kecurangan akan muncul, apalagi kalau saksi yang dibutuhkan tidak ada di wilayah terpencil, wasalam," ucap Sigit.

Lebih jauh, Sigit meminta seluruh anggota Polri mulai saat ini mempelajari tahapan Pemilu 2024 yang sudah berjalan. Polri harus bisa menjadi cooling system. "Saya perintahkan kepada seluruh jajaran bagaimana rekan-rekan bisa ikut menjadi cooling system. Karena apa? Situasi sudah panas, maka bagaimana peran rekan-rekan untuk men-dinginkan situasi yang panas," kata Sigit.

"Perbedaan boleh ada, yang namanya 1 keluarga tidak ada yang sama, pasti masing-masing memiliki perbedaan. Namun, jangan karena perbedaan itu terus membuat menjadi permusuhan, itu yang selalu harus kita ingatkan, kerja sama dengan tokoh adat, tokoh agama," tutur Sigit. (wid,rls,ant/dya)

ALASAN KPU TAK BISA BERI AKSES PENUH BAWASLU TERKAIT SILON

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- **Pasal 17 huruf g** UU Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh publik adalah informasi yang apabila dibuka dapat mengungkap isi akta otentik bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang.
- **Pasal 17 huruf h** menyebutkan bahwa informasi yang dikecualikan termasuk informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi terdiri atas riwayat dan kondisi anggota keluarga; riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; dan/atau kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang. Ada pula informasi mengenai hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal.
- **Pasal 18** mengatur bahwa informasi yang dapat dipublikasikan adalah putusan badan peradilan; ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, atau bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum; surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan; rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum; dan laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum.

Pemerintah Kembali Impor Beras 1 Juta Ton



(Ilustrasi) Pemerintah kembali mengimpor beras sebanyak 1 juta ton

JAKARTA – Pemerintah akan kembali mengimpor beras sebanyak satu juta ton. Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunjuk Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog akan untuk mendatangkan beras dari India.

"Kan Bulog itu nanti. Tinggal MoU nya bentar lagi selesai, terus bisa realisasi," ujar Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Budi Santoso, usai rapat bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Juni 2023, dikutip dari tempo.co.

Dia menjelaskan jika MoU dengan India selesai, kemudian tinggal mekanisme impor. Menurut Budi, proses tersebut akan selesai dalam beberapa hari. "Jumlahnya kita belum tahu persis, kan kita tunggu MoU, ya mungkin sejuta," tutur dia.

Sebelumnya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, mengatakan fenomena El Nino menyebabkan sejumlah harga bahan pokok naik, misalnya gula dan bawang putih. Karena ada El Nino. Beberapa bahan pokok mulai naik. Gula misalnya sudah jauh harganya. Bawang juga naiknya dua kali lipat," kata Zulhas, sapaan akrabnya.

Dia menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) hingga kementerian terkait untuk membahas langkah antisipasi dari dampak El Nino ini. Salah satunya kesepakatan impor beras dengan India.

"Makanya saya sudah MoU dengan India 1 juta ton. Sewaktu waktu bisa beli. Jadi harga sudah diikat GtoG (Government to Government) antara pemerintah dengan pemerintah, kita sudah pesan 1 juta ton," ujar Zulhas, pada Kamis (15/8/2023).

Menurut Zulhas, rencana impor tersebut dilakukan di luar penugasan Bapanas kepada Bulog untuk impor beras 2 juta ton beras sepanjang 2023. Sebelumnya, Bulog mendapatkan tugas dari Bapanas untuk mengimpor 2 juta ton beras untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras pemerintah (CBP) hingga akhir 2023.

Sementara itu, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rahmi Widiriani mengatakan, impor beras 1 juta ton dari India merupakan hasil dari kerja sama dagang antara pemerintah Indonesia dengan India.

"Kalau sepengetahuan saya, itu Pak Mendag (Menteri Perdagangan) dengan India itu MoU (Memorandum of Understanding/ Nota Kesepahaman). MoU G to G (government to government/ antarpemerintah) terkait dengan neraca perdagangan antar negara. Jadi pak Mendag lah yang tahu kalau soal neraca perdagangan," kata Rachmi kepada CNBC Indonesia, Selasa (20/6/2023).

Rachmi menjelaskan, ditandatanganinya MoU oleh Mendag dan pemerintah India adalah untuk mengantisipasi terjadinya El Nino, serta untuk mengantisipasi dampak dari ketidakpastian geopolitik.

"Dalam mengantisipasi El Nino dan antisipasi dampak dari ketidakpastian geopolitik, salah satu yang di MoU kan adalah rencana pembelian beras dari India sebesar 1 juta ton, itu memang di luar dari 2 juta ton yang disepakati atau ditetapkan lewat Ratas (Rapat Terbatas). Tapi itu terkait dengan neraca perdagangan antarnegara, jadi G to G, cuman nanti operasional ke bawahnya itu kami

belum tahu," ujarnya.

"(Jadi, saat kondisi membutuhkan beras dari luar negeri) Indonesia sudah memiliki MoU untuk trading atau beli beras dari India," lanjutnya.

Namun secara operasional, lanjut Rachmi, nantinya MoU G to G itu akan dioperasionalkan secara Business to Business (B to B) untuk pembeliannya.

"Karena kalau kita perhatikan untuk beras yang umum atau beras masyarakat dengan kualitas umum, yang medium, itu untuk penugasan impor itu dilakukan oleh BUMN, nah turun ke bawahnya itu yang kita belum ada (gambaran)," terangnya.

Meski demikian, Rachmi menjelaskan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No 125/2022 ada dua BUMN pangan yang diberi penugasan untuk impor yakni Perum Bulog dan ID Food.

Oleh sebab itu, lanjutnya, ada kemungkinan mekanisme impor 1 juta ton beras dari India ini juga akan ditugaskan kepada BUMN pangan tersebut, tinggal tergantung beras jenis apa yang akan diimpor.

"Kalau perintah untuk impor pangan itu BUMN ada dua, bisa Bulog atau bisa juga ID Food. Tapi selama ini, karena di Bulog ini yang mengelola beras, sesuai dengan Perpres 125 tahun 2022 itu beras, jagung, kedelai di cadangan pangannya Bulog, itu kemungkinan besar Bulog (yang ditugaskan). Kalau yang beras medium ya, yang umum," jelas Rachmi.

"Tapi kalau beras khusus, misalnya di India nanti, misalnya ya karena saya gak tahu juga, yang di MoU kan itu beras apa, itu bisa juga penugasannya lewat ID food," imbuhnya.

Lebih lanjut, Rachmi masih belum bisa merinci waktu pelaksanaan impor beras 1 juta ton tersebut.

"Kita mesti lihat MoU nya itu berlaku berapa lama, karena saya juga belum tahu. Itu kan kesepakatan negara dengan negara. (Yang pasti) kita sudah bersepakat untuk mengantisipasi bila terjadi keadaan ini (El Nino atau dampak Geopolitik), 'kami bisa ya beli beras dari negara Anda'. Nanti akan diturunkan teknisnya, biasanya dengan B to B, ada perjanjian jual beli atau gimana, biasanya seperti itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Mendag Zulhas mengatakan, pemerintah berencana menambah pengadaan kuota impor beras dari yang sebelumnya 2 juta ton menjadi 3 juta ton sebagai antisipasi El Nino.

Adapun asal beras impor dari rencana penambahan 1 juta ton tersebut nantinya dari India. Rencana pengadaan beras ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi dampak El Nino apabila kebutuhan beras di Tanah Air berkurang.

"Beras kita memang harus ambil walaupun kadang-kadang tidak populer, ambil inisiatif. Kalau El Nino berat harganya kita enggak boleh beras kurang. Oleh karena itu saya sudah (tandatangani) Momenandum of Understanding atau nota kesepahaman dengan India 1 juta ton sewaktu-waktu bisa beli. Government to Government kita sudah pesan 1 juta ton," kata Zulhas saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Zulhas menyampaikan, rencana importasi tersebut dilakukan di luar penugasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) ke Perum Bulog untuk impor beras 2 juta ton sepanjang tahun 2023.

"Iya, iya di luar, ini baru MoU untuk harga tetap barang ada tapi belum kita beli tapi sudah ada MoU GtoG, tahun ini kalau butuh bisa beli. Barangnya sudah ada," jelasnya.

Di dalam surat itu disebutkan, impor beras sebanyak 2 juta ton bertujuan untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras pemerintah (CBP) hingga akhir tahun 2023. Namun, untuk saat ini yang perlu segera dilakukan adalah impor beras sebanyak 500.000 ton.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, penugasan impor beras 2 juta ton tersebut merupakan alokasi sepanjang 2023. Impor akan dilakukan secara bertahap dengan melihat kondisi produksi beras dalam negeri.

"Ini alokasi. Jadi sekaligus dikasih tugas dalam satu tahun, tapi tidak berarti 2 juta itu harus (langsung) dimasukkan semua, enggak," ujar Buwas saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (27/3/2023). (lut/dya)

WNA Ilegal Berhasil Mengajar di Dua Kampus di Tulungagung

TULUNGAGUNG – Seorang warga negara asing (WNA) asal Singapura, Mohtar Bin Bakri (66), berhasil menetap dan menjadi dosen pada dua kampus di Tulungagung. Pria yang memiliki nama lain Yatno ini, tercatat mengajar di Universitas Bhineka PGRI dan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Tak hanya itu, Mohtar juga sudah memperoleh Nomer Induk Dosen Nasional (NIDN). Kini NIDN tersebut telah dihapus seiring dengan kasus pelanggaran imigrasi yang dilakukannya. Rektor Universitas Bhineka PGRI, Imam Sujono mengatakan yang bersangkutan sudah mengajar sejak tahun 2008 lalu.

Pada tahun 2009, Mohtar telah memperoleh NIDN dari kampus tersebut. Statusnya di kampus ini sebagai dosen tetap yayasan. Sejak bulan Maret lalu, Mohtar telah mengundurkan diri sebagai dosen di kampus tersebut. "Jadi saat kasusnya ramai statusnya sudah bukan dosen di Universitas Bhineka PGRI, yang bersangkutan sudah kami berhentikan karena mengundurkan diri," ujarnya, Rabu (21/6/2023) dikutip dari jatimnow.com.

Mohtar mengajar di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Selama mengajar, banyak mahasiswa yang mengeluh karena kurang paham dengan penyampainnya. Hal ini dikarenakan dialek bahasa Indonesia yang aneh bagi mahasiswa. Mohtar cenderung menggunakan dialek bahasa melayu. Meskipun begitu tidak ada yang curiga dengan kewarganegaraannya. "Pengakuannya berasal dari luar Jawa, jadi kami memaklumi-nya lantaran dialeknya berbeda," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Bagian Umum Biro AUAK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Ulil Abshor menjelaskan status Mohtar di kampus negeri ini hanya sebagai Dosen Luar Biasa (DLB).

Mohtar juga sudah mengundurkan diri pada bulan Maret lalu. Dalam surat pengunduran diri, yang bersangkutan mengaku ingin berhenti mengajar dan pensiun. "Semester ganjil lalu masih mengajar, yang bersangkutan dosen di Fakultas Tarbiyah," pungkasnya.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Tulungagung angkat bicara terkait kasus WNA yang memiliki dokumen kependudukan WNI secara ilegal. Sebelumnya Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar mengamankan Mohtar Bin Bakri (66) WNA asal Singapura.

Dia juga merupakan dosen di Tulungagung diketahui memiliki dokumen WNI yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil setempat. Padahal dia tidak pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan status WNI.

Kepala Dispendukcapil Tulungagung, Nina Hartiani mengatakan sesuai data yang ada mereka mengeluarkan dokumen atas nama MB pada 30



Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar, Arief Yudistira. (Foto: Bramanta Pamungkas/jatimnow.com)

September 2022. Dokumen yang diterbitkan ini berupa KTP, KK dan Akta Kelahiran. Pengeluaran dokumen ini berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung nomor 125/Pdt.P/2019/PN Tlg tentang perubahan identitas.

"Jadi kami mengeluarkan dokumen berdasarkan putusan tersebut," ujarnya, Rabu (21/6/2023).

Dalam putusan tersebut identitasnya berubah. Semula namanya adalah Yatno, kelahiran Pacitan 9 Februari 1973 berubah menjadi Mohtar bin Bakri, kelahiran Kampong Pachitan off Changi Rd Singapore 1956.

Pihak Dispendukcapil mengaku tidak mengetahui riwayat kewarganegaraannya. Pihaknya hanya melakukan perubahan sesuai dengan keputusan pengadilan negeri.

"Kami hanya berdasarkan surat putusan pengadilan dan pengakuan yang bersangkutan saja," tuturnya. Pada bulan Mei lalu, pihak Dispendukcapil mendapat undangan dari Imigrasi terkait masalah tersebut. Mereka lalu melakukan pengecekan dan menemukan bahwa nama Yatno dan Mohtar bin Bakri adalah satu orang yang sama.

Nina juga mengaku tidak mengetahui riwayat pasti bagaimana MB bisa mendapatkan dokumen kependudukan sebelum tahun 2022. Pasca kejadian ini mereka telah berkirir surat ke pemerintah pusat untuk dilakukan penghapusan terkait data tersebut.

"Kami sudah berkirir surat ke Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk menghapus data kependudukan yang bersangkutan," pungkasnya.

Kanwilkuham Jawa Timur akan melakukan deportasi terhadap

Mohtar Bin Bakri. Berdasarkan pemeriksaan, Mohtar Bin Bakri diketahui memiliki dokumen sebagai WNI. Padahal Mohtar Bin Bakri tidak pernah mengajukan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia secara sah. Pria ini juga memalsukan nama dan identitasnya selama berada di Tulungagung.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar, Arief Yudistira mengatakan, Mohtar Bin Bakri sudah berada di Tanah Air sejak tahun 1984. Dari hasil pemeriksaan, diketahui tujuan masuk ke Indonesia untuk kepentingan pendidikan. Yang bersangkutan menjalani pendidikan S1 di wilayah Malang dan lulus sekitar 2006.

"Pada medio 1984-1998, MB (Mohtar Bin Bakri) menggunakan visa kunjungan dengan paspor Singapura. Selama itu, tercatat dia keluar masuk Indonesia sekitar 10 kali," ujarnya, Rabu (21/6/2023).

Pada 2011, Mohtar Bin Bakri mendapatkan dokumen kependudukan. Tidak hanya KTP dan kartu keluarga, namun juga lengkap dengan akta lahir. Mohtar Bin Bakri melakukan perubahan nama menjadi Yatno, lahir di Pacitan 1973. Padahal sesuai Paspor Singapura, Mohtar Bin Bakri lahir pada 1956 di Kampong Pachitan off Changi.

"Jadi di Singapura juga ada wilayah dengan nama mirip Pacitan juga, yaitu Kampong Pachitan off Changi Rd S'pore," jelasnya.

Tak hanya menjadi dosen, Mohtar Bin Bakri juga sempat menikah dengan warga lokal Blitar. Keberadaan WNA asal Singapura ini cukup lama tidak terendus aparat. Arief mengungkapkan, pendataan dokumen keimigrasian kala itu masih

menggunakan metode konvensional. Sehingga, warga asing ini bisa beraktivitas tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi.

"Kami sudah konfirmasi ke Kedutaan Singapura. Dari sana terkonfirmasi yang bersangkutan masih tercatat sebagai warga Singapura. Kami cek juga ke Ditjen AHU, ternyata MB juga tidak pernah mengajukan perpindahan menjadi warga negara Indonesia," ucapnya.

Sebelumnya sebanyak 3 WNA diamankan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar. Dua WNA diketahui berasal dari Pakistan dan 1 WNA dari Singapura. Mereka terbukti melakukan pelanggaran imigrasi. MB sendiri dijadwalkan dideportasi pada 22 Juni mendatang. Imigrasi Blitar. (lut/jatimnnw/dya)



MB, oknum WNA Singapura yang berhasil menetap dan menjadi dosen pada dua kampus di Tulungagung (Foto: ANTARA/HO)



IFY

ALYSSA

USAHA TAK MENGHIANATI HASIL

Foto-foto : Instagram/ifyalyssa

SEBAGAI Musisi, Yfy Alyssa (26) kerap mengalami kebuntuan saat menulis lagu.

Inspirasi datang dan pergi. Padahal, dalam berkarya, dia butuh inspirasi yang “selalunsiap” kapanpun.

Dia mengatakan, inspirasi dapat datang ketika keluar dari zona nyaman. Inspirasi bisa diperoleh dari mengamati karya orang lain.

Apabila inspirasi belum datang juga, Ify menyebut istirahat sebagai tips yang penting.

“Jangan diforsir. Manfaatkan waktu istirahat benar-benar untuk me-recharge diri sendiri,” ujarnya.

Selain itu, kolaborasi bisa mendatangkan inspirasi. Dalam album *Bermain Rintik di Musim Hujan*, Ify berkolaborasi dengan HIVI!, Gerald Situmorang, dan Sri Hanuraga.

“Pandemi membuat aku stuck. Bingung mau ngapain di rumah. Ketika ada inisiatif membuat album bersama, aku langsung menyambut. Ternyata lagu-lagu yang tercipta menunjukkan irisan ciri khas masing-masing,” tuturnya

Selalu tahu apa yang dimau dan apa yang ingin dicapai, Ify Alyssa selalu memberikan 100 persen dari dirinya dalam berbagai hal yang ia lakukan.

Bercerita tentang proyek yang ia lakukan, Ify menyebut dirinya selalu memikirkan setiap detail kecil pekerjaannya.

Diakui Ify hal tersebut memang membuatnya merasa sangat lelah, namun buatnya itu sepadan dengan apa yang ia hasilkan.

“Asyik mengerjakan apa yang aku mau itu ya aku dapetin hasil yang aku mau, sesuai bayangan aku dan hasilnya juga lebih personal, lebih puas, lebih senang juga. Nggak tahu kenapa walaupun capek banget, pasti (maunya) ngerjain semua sendiri,” tutur Ify Alyssa.

Senang mewujudkan ide dalam pikiran lewat caranya, Ify tak mau melewatkan berbagai kesempatan yang ada, termasuk mengerjakan sendiri beragam hal yang ia bisa.

Usaha tak pernah mengkhianati hasil, adalah hal yang selalu ia pegang dalam karier musiknya hingga saat ini.

“Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Karena kalau aku leha-leha doang ya gimana mau mencapai goal yang selama ini aku pikirkan setiap hari, aku mau ini, aku mau itu,” ucapnya.

Saat ditanya tentang gambaran dirinya, Ify menyebut dirinya adalah sosok yang selalu tahu

apa yang ia mau.

Ya hal tersebut terlihat secara konsisten di berbagai proyek yang ia kerjakan, di mana sentuhan dan gambaran dirinya yang manis jadi sesuatu yang tak terpisahkan.

“Aku selalu tahu apa yang aku mau, tidak mudah menyerah sama konsisten,” kata Ify.

Ify lahir dengan nama Alyssa Saufika Umari pada 6 Desember 1996 di Bandung.

Ify adalah anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Tubagus Hanafi Soeriaatmadja dan Gina Sonia.

Ayahnya berprofesi sebagai direktur program MM eksekutif Binus Business School sedangkan ibunya berprofesi sebagai penyiar berita.

Ify adalah anak perempuan satu-satunya, ia memiliki kakak laki-laki bernama Eizel Mauldy Muhammad dan adik laki-laki bernama Khalif Ali Husain.

Ify merupakan seorang penyanyi yang mulai terkenal setelah mengikuti acara pencarian bakat *Idola Cilik Musim Pertama*.

Ify dilahirkan di

keluarga yang memang berlatar belakang seni, sehingga kecintaannya terhadap dunia seni dan hiburan dipengaruhi oleh keluarganya (berbagai sumber)



SETIAP BUTIR BERAS MENGANDUNG NUTRISI PENTING

NASI merupakan makanan pokok beberapa daerah, seperti Asia dan Afrika. Tidak hanya itu, banyak makanan yang menggunakan bahan ini di seluruh dunia.

Mencuci beras biasanya dilakukan oleh beberapa orang saat memasak nasi. Adapun beberapa orang yang tidak mencucinya dan langsung dimasak.

Orang mencuci beras biasanya karena jenis berasnya, tradisi, sosialisasi, dan lainnya. Sebenarnya, apakah beras harus dicuci sebelum dimasak?

Dilansir dari IFL Science, pakar kuliner mengatakan bahwa beras yang sudah dicuci sebelumnya mengurangi jumlah pati yang berasal dari butiran beras.

Hal ini dapat dilihat pada air bilasan yang keruh yang menurut penelitian merupakan amilosa yang dihasilkan dari proses penggilingan.

Di dunia kuliner, mencuci dianjurkan untuk beberapa hidangan ketika biji-bijian seperti beras dihidangkan terpisah.

Namun, hidangan lain yang membutuhkan efek lengket dan lembut seperti risotto dan puding nasi, prosedur pencucian dihilangkan.

Sebuah studi yang dilakukan Hong Yan Li, dkk. membandingkan efek pencucian terhadap kelengketan dan kekerasan tiga jenis beras berbeda dari pemasak yang sama, yakni beras ketan, beras berbulir sedang, dan beras melati.

Beras yang berbeda ini tidak dicuci sama sekali, dicuci tiga kali dengan air, atau dicuci sepuluh kali dengan air.

Berlawanan dengan apa yang akan dikatakan oleh koki, penelitian ini menunjukkan bahwa proses pencucian tidak berpengaruh pada tekstur nasi.

Para peneliti menunjukkan bahwa kelengketan itu bukan karena amilosa, tetapi pati berbeda yang disebut amilopektin yang tercuci dari butiran beras selama proses pemasakan.

Jumlah yang tercuci berbeda antara jenis butir beras. Jadi, jenis beras berpengaruh dalam teksturnya, bukan prosedur pencucian.

Dilansir dari Inverse, beras menyumbang 20 persen energi yang

dikonsumsi manusia.

Setiap butir beras mengandung nutrisi penting, seperti serat makanan, vitamin B, dan karbohidrat.

Para ilmuwan telah menyelidiki bagaimana metode persiapan yang berbeda memengaruhi produk jadi beras, terutama kualitas nutrisinya.

Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian AS, mencuci beras sebelum dimasak dapat membuang protein yang berharga dan nutrisi lain yang larut dalam air.

Namun, mencuci tidak sepenuhnya menghilangkan nilai gizi biji-bijian. Dilansir dari IFL Science, prosedur pencucian beras biasanya dilakukan untuk menghilangkan debu, serangga, kulit beras kering, kerikil, atau kotoran lainnya.

Tidak hanya itu, proses pencucian telah terbukti membilas hingga 20 persen plastik dari beras mentah.

Beras juga diketahui mengandung kadar arsenik yang relatif tinggi karena tanaman menyerap lebih banyak arsenik saat tumbuh.

Mencuci beras telah terbukti

menghilangkan sekitar 90 persen arsenik yang dapat diakses secara hayati. Kadar arsenik dalam beras bervariasi tergantung di mana ia ditanam, kultivar beras, dan cara memasaknya.

Mencuci beras tidak akan berpengaruh pada kandungan bakteri pada nasi yang dimasak karena suhu memasak yang tinggi akan membunuh semua bakteri yang ada.

Hal yang harus diperhatikan adalah berapa lama menyimpan nasi atau beras yang sudah dicuci pada suhu ruangan. Menanak beras yang sudah lama di suhu ruang tidak membunuh spora bakteri dari patogen bernama *Bacillus cereus*.

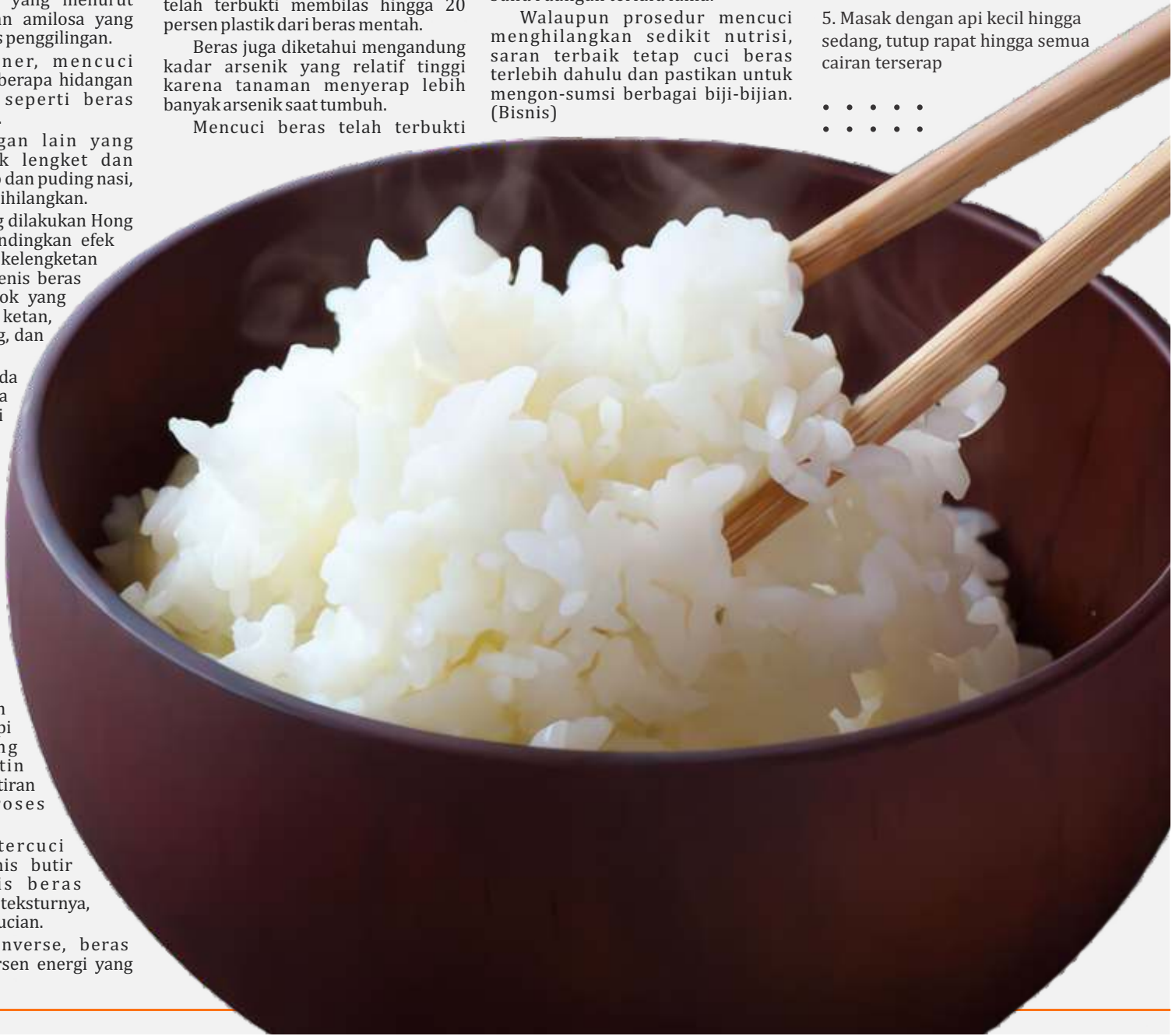
Jadi, pastikan untuk menghindari menyimpan beras yang sudah dicuci atau dimasak pada suhu ruangan terlalu lama.

Walaupun prosedur mencuci menghilangkan sedikit nutrisi, saran terbaik tetap cuci beras terlebih dahulu dan pastikan untuk mengonsumsinya berbagai biji-bijian. (Bisnis)

METODE PENGANTI MENCUCI BERAS UNTUK BANTU PERTAHANKAN NUTRISINYA

1. Tambahkan empat gelas air untuk direbus dalam panci besar
2. Tambahkan satu cangkir nasi mentah ke dalam air mendidih
3. Setelah lima menit merebus beras, tiriskan airnya
4. Tambahkan dua gelas air segar ke dalam panci berisi beras
5. Masak dengan api kecil hingga sedang, tutup rapat hingga semua cairan terserap

• • • • •
• • • • •



KOMPOR GAS PANCARKAN ZAT PEMICU KANKER

PENELITI dari Stanford University, California, Amerika Serikat (AS) menemukan kompor gas yang biasa digunakan pada rumah tangga dapat melepaskan bahan kimia berbahaya benzena, yang dapat memicu kanker.

Studi yang diterbitkan dalam jurnal Environmental Science and Technology itu mengatakan jumlah benzena yang dipancarkan dari kompor gas bahkan bisa lebih tinggi dari asap rokok bekas.

Para peneliti mengkaji kompor gas pada 87 rumah tangga di seluruh California dan Colorado. Ditemukan bahwa kompor gas atau propana menghasilkan lebih banyak benzena daripada alternatif elektroniknya.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS memperingatkan paparan benzena yang berkepanjangan dapat menyebabkan perkembangan kanker darah, serta berpotensi menyebabkan masalah kesehatan anak.

Sekitar 29 persen emisi benzena dapur bahkan lebih tinggi daripada

jumlah benzena yang dihirup selama perokok pasif.

Namun, ini tidak berarti bahwa efeknya sama berbahaya dengan perokok pasif. Asap tembakau mengandung berbagai zat berbahaya lainnya seperti arsenik dan formaldehida, yang dikenal sebagai karsinogen dan dapat menyebabkan masalah kesehatan.

"Benzena terbentuk dalam api dan lingkungan bersuhu tinggi lainnya, seperti suar yang ditemukan di ladang minyak dan kilang. Sekarang kita tahu bahwa benzena juga terbentuk dalam api kompor gas di rumah kita," kata penulis senior dan profesor di ilmu bumi di Stanford University, Rob Jackson, seperti dilansir Medicaldialy, Senin (19/6).

"Ventilasi yang baik membantu mengurangi konsentrasi polutan, tetapi kami menemukan bahwa kipas angin sering tidak efektif untuk menghilangkan paparan benzena," tambahnya.

Lalu, bagaimana cara mengatasi-

nya? Berikut beberapa tindakan pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak menghirup benzena tingkat tinggi:

1. Ventilasi dapur

Hindari dapur tertutup, buka jendela dan gunakan kipas angin untuk membersihkan ruangan dari gas polutan berbahaya.

2. Gunakan pembersih udara

Pembersih udara atau akrobat disebut air purifier dapat meningkatkan kualitas udara dalam ruangan dengan mengurangi polutan, namun alat ini memiliki keterbatasan.

Untuk memilih pembersih udara yang tepat, pertimbangkan kemampuan tingkat pengiriman udara bersih dan sesuaikan dengan ukuran ruangan. Lupa untuk mengganti filter jika sudah kotor untuk performa yang lebih baik.

3. Beralih ke alat masak listrik

Memilih peralatan listrik hemat energi daripada peralatan bertenaga gas dapat membantu mengurangi biaya, meminimalkan kekacauan, dan

mengatasi masalah lingkungan dengan membantu menghilangkan benzena.

Kompor gas dikembangkan untuk pertama kalinya pada 8 Maret 1802 oleh Zachäus Winzler, namun kemudian dipatenkan oleh James Sharp di Northampton, Inggris pada tahun 1826.

Penemuannya dipasarkan oleh perusahaan Smith & Philips sejak tahun 1828. Hingga kemudian pada tahun 1836, James membuka pabrik kompor gasnya sendiri.

Seorang tokoh penting dalam penerimaan awal teknologi baru ini adalah Alexis Soyer, koki terkenal di Reform Club di London. Sejak 1841, ia mengubah dapurnya untuk menggunakan gas pipa, dengan alasan bahwa gas secara keseluruhan lebih murah karena pasokannya dapat dimatikan saat kompor tidak digunakan. (Ant)



HARIAN
LENERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENERA TODAY"

PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI

OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)

PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)

PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)

REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)

MEDIA TERVERIFIKASI



BIRO: SURABAYA: LUTFI YUHANDI | **MOJOKERTO:** RAHMAD SURYADI | **GRESIK-LAMONGAN:** ASEPTA YOGA P (ID SERTIFIKASI 3189) | **KEDIRI-JOMBANG-NGANJUK:** GATOT SUNARNO | **TAPAL KUDA (PASURUAN-PROBOLINGGO BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI):** IMAN SANTOSO, | **MADIUN:** IMAM GHOZALI (ID SERTIFIKASI 11563), | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **TRENGGALEK:** ANGGA PRAYOGA

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO | **SEKERTARIS** ISTIDHA NUR AMANAH,

DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, KIKI AMALIA GUYEN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

CORAT-CORET LIMA MENIT BANTU LEPASKAN STRES

MENCORET-coret di atas selembar kertas bermodalkan sebuah spidol, pensil warna atau pulpen hingga menghasilkan gambar abstrak yang dikenal sebagai doodle art, selama lima menit bisa membantu melepas stres, menurut Founder & CEO Ganara Art Space Tita Djumaryo.

Sebelum mulai menggambar, orang-orang perlu mencoba fokus dengan cara menutup mata.

"Tutup mata dulu. Kertas ditaruh di depan. Spidolnya dibuka. Kita akan gambar sambil tutup mata mengikuti lagu. Tidak ada tekanan apa pun," kata Tita di Jakarta.

Selanjutnya, mereka bisa mulai menggambar dari tengah atau pinggir kertas sembari mendengarkan lagu yang dibayangkan seperti gelombang tak kunjung berakhir.

"Goyangkan spidolnya lalu telusuri kertas, kita menjadi satu dengan diri sendiri," tutur Tita.

Melalui coretan itu, Tita mengajak orang-orang memahami bahwa saat itu yang dibayangkan hanya gelombang-gelombang yang arahnya dibebaskan.

Saat itu, mereka diminta hanya memikirkan diri sendiri dan membayangkan banyak gelombang yang bisa dibayangkan sebagai emosi yang lepaskan.

"Banyak jalan yang akhirnya pelan-pelan kembali menuju ke tengah. Lalu buka matanya," kata Tita setelah meminta orang-orang yang menggambar coretan selama lima menit sembari menutup mata.

Hasil coretan bisa beragam mulai

dari garis-garis yang membentuk seperti lingkaran besar, lingkaran kecil dan lainnya.

Coba perhatikan garis bersinggungan yang membentuk lingkaran dan isi dengan pola-pola seperti polkadot, garis-garis, zig-zag dan lainnya.

Tita menyarankan orang-orang melakukan hal ini di akhir hari sebelum beristirahat, selama sekitar 5 - 10 menit.

Menurut dia, menggambar dengan satu kali garis, seperti ini bisa menjadi salah satu cara untuk kembali ke diri sendiri dengan mudah yakni saya akan menggambar dan bisa diri sendiri.

"Yang sangat menyenangkan melakukan ini untuk diri sendiri karena biasanya kita suka lupa bahwa yang harus kita sangat dihargai adalah diri sendiri. Agak messy enggak apa-apa," kata Tita.

Tita bersama Ganara Art Space nantinya menjadi salah satu pengisi kelas dalam gelaran "Plaza Indonesia Wellness Festival" yang akan berlangsung pada 24 Juli hingga 30 Juli 2023. Dia dan tim juga akan membangun instalasi seni.

"Melupakan sejenak deadline dalam waktu sekitar satu jam saat tangan memegang karya seni, kita tidak pegang sumber stres (hand-phone) tangan kita merasakan langsung," kata dia.

Dalam kesempatan itu General Manager Marketing Plaza Indonesia Zamri Mamat mengatakan timnya melalui gelaran acara bertema "Unplug and Reconnect with Your

Well-Being" nantinya menghadirkan lebih dari 40 kelas untuk membantu pengunjung lebih memperhatikan diri sendiri dan rehat sejenak dari kesibukan.

"Kami memilih tema ini cukup sesuai karena kita suka lupa wellness diri kita, terlalu sibuk dengan deadline. Kami ingin ajak konsumen berhenti sejenak, think of yourself," tutur dia.

Selain kelas seni, yoga dan meditasi bagi pemula juga menjadi bagian dari acara itu. Founder & CEO of Wellness Inc. Cindy Gozali mengakui meditasi bisa membantu orang-orang mengatur emosi dan menanggapi semua yang harus serba buru-buru dengan lebih baik dan positif.

"Itu gunanya mindfulness," kata dia (Ant)

• • • • •
• • • • •



'Anies Segera Jadi ... (dari hal 1)

MANTAN Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, menyebar rumor KPK segera mengumumkan perkembangan dugaan kasus korupsi Formula E dan Anies Baswedan segera ditetapkan sebagai tersangka. KPK pun buka suara atas rumor yang disebar Denny itu.

Denny mengatakan informasi penetapan tersangka kepada Anies telah beredar di banyak kalangan. Dia menyebut status hukum itu sebagai upaya menjegal Anies dalam Pilpres 2024.

"Kabar itu sudah menjadi informasi yang beredar di banyak kesempatan. Bukan hanya saya, banyak yang sudah menyatakannya. Feri Amsari, Zainal Arifin Mochtar, misalnya, dalam beberapa podcast sudah menyatakan, pentersangkaan adalah salah satu skenario pamungkas Istana untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024," kata Denny dalam keterangan tertulis Rabu (21/6/2023).

Menurut Denny, KPK telah melakukan ekspose di kasus Formula E hingga belasan kali. Dia menyebut ada anggota DPR yang menyampaikan bahwa Anies segera ditetapkan sebagai tersangka. "Setelah KPK 19 kali ekspose, ini pemecah rekor, seorang anggota DPR menyampaikan, Anies segera detersangkakan. Semua komisioner sudah sepakat. Makin terbaca, kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK satu tahun. Untuk menyelesaikan tugas memukul lawan-oposisi, dan merangkul kawan-koalisi, sesuai pesanan kuasa status quo," jelas Denny.

Denny juga menuding Presiden Joko Widodo terlibat dalam upaya penjegalan Anies sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Menurutnya, Jokowi telah menyiapkan 10 langkah dalam memuluskan rencananya tersebut.

"Saya berharap, Presiden Jokowi menghentikan cawe-cawanya, termasuk mentersangkakan dan menjegal Anies. Kalau masih diteruskan, menjadi pertanyaan apa maksud dan tujuannya?" ujar Denny.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri angkat bicara soal pernyataan Denny Indrayana. KPK membantah telah menetapkan adanya tersangka dalam kasus Formula E. "Sejauh ini masih pada tahap penyelidikan," kata Ali.

Ali mengatakan pihaknya tidak akan menanggapi pernyataan yang bersifat asumsi belaka. Dia menegaskan kerja KPK tidak terpengaruh kepentingan politik tertentu. "Kami tak akan tanggap pernyataan yang berbasis asumsi dan persepsi. Sekalipun kami hargai itu sebagai suatu hak kebebasan berpendapat. Kami penegak hukum, tetap bekerja tegak lurus dan tak terpengaruh pernyataan dan intervensi politik dari pihak yang terlibat dalam pertarungan politik di luar KPK," ujar Ali.

Tanggapan Kubu Anies

Namun, Anggota Tim 8 perwakilan dari Anies Baswedan, Sudirman Said,

menilai pernyataan Denny tidak mungkin tak berdasar. "Prof Denny itu hampir seluruh yang dikatakan itu menjadi kebenaran ya, ya dia seorang intelektual, seorang akademisi lah tidak mungkin ngarang-ngarang," kata Sudirman kepada wartawan di Sekretariat Perubahan, Jalan Brawijaya, Kebayoran, Jakarta, Rabu (21/6/2023).

Sudirman mengapresiasi Denny yang telah mengeluarkan pernyataan itu. Pernyataan Denny dinilai sebagai peringatan dini. "Dan kita memberi apresiasi karena yang disampaikan Prof Denny semacam early warning, jangan sampai itu terjadi gitu," ungkapnya.

Lebih lanjut, eks Menteri ESDM itu mengaku menghargai proses hukum apabila seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka jika memang terbukti. Namun demikian, jika hal itu salam rangka untuk menghalangi hak politik seseorang, Sudirman menegaskan harus melawan. "Dan cara melawan dengan opini publik. Karena ini ranahnya publik bukan pribadi. Jadi kita apresiasi kepada Prof Denny karena terus memberikan ingatan terhadap lembaga-lembaga hukum dari waktu ke waktu," tandas dia.

Terpisah, Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, menyuarakan dugaan korupsi yang mencatat nama capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia pun menyebut, Eks Wakil Menteri Hukum dan HAM itu kerap kali bersuara berdasarkan informasi yang didapat. Kendati begitu, Sahroni menyerahkan penegakan hukum pada KPK. "Denny Indrayana kan selalu bersuara terkait dengan, mungkin, dapat informasi yang tidak tepat, tapi apapun itu semua kan berjalan, proses penegakan hukum dilakukan oleh KPK yang terkait dengan formula E misalnya, kan berjalan terus," kata Sahroni saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/6/2023).

Dia pun mewajarkan Denny Indrayana yang kerap kali bersuara. Menurutnya, informasi yang diungkap Pakar Hukum Tata Negara itu bisa jadi sebuah kebenaran. "Kita tunggu proses selanjutnya bagaimana. Tapi kalo Denny Indrayana ngomong kan biasa, ngomong-ngomong saja dia. Ya namanya, mungkin, dapat informasi ya belum tentu bener, belum tentu salah juga," katanya.

"Ya prediksi isu kan pasti orang menyangka ini penjegalan oleh kelompok, misalnya, kekuasaan, nggak suka dengan Pak Anies misalnya, itu kan isu. Belum tentu juga benar kok," tandasnya.

Partai Demokrat (PD) sebagai salah satu pengusung Anies juga buka suara. Demokrat menyebut jika hal itu bentuk kepedulian Denny kepada demokrasi. "Kami menghormati kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat Prof Denny Indrayana. Kami melihat ini sebagai ekspresi kepedulian Prof Denny Indrayana terhadap demokrasi dalam kapasitas perannya sebagai aktivis dan guru besar hukum tata negara. Apa yang disampaikan tentu memiliki dasar

dan alasan yang memadai," kata Deputy Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Rabu (21/6/2023).

Lebih lanjut Kamhar mengatakan jika hal-hal yang disampaikan oleh Denny perlahan terungkap kebenarannya. Ia kemudian menilai sikap yang dilakukan Denny sebagai pengingat agar tak ada penyalah-gunaan kekuasaan. "Apalagi sebagai-mana disampaikan dalam keterangan persnya, satu-per satu tulisannya di 24 April 2023 mulai terbukti," kata Kamhar.

"Oleh karena itu pernyataan Prof Denny Indrayana akan detersangkakan dan dijegalnya Mas Anies ini menjadi semacam wake up call bagi seluruh penggiat demokrasi dan civil society untuk melakukan kontrol demokrasi agar tak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)," sambungnya.

Selanjutnya Kamhar mewanti-wanti jangan sampai isu penjegalan Anies Baswedan menjadi bagian dari penundaan pemilu. Pihaknya berharap perkiraan yang disampaikan Denny keliru. "Jangan sampai apa yang menjadi hipotesis Prof Denny Indrayana bahwa penjegalan Mas Anies ini untuk mengundang ketidak-pastian dan kegaduhan sebagai bagian dari operasi politik penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan benar terjadi. Kita semua tentunya tidak mengharapkan itu, dan berharap hipotesis Prof. Denny Indrayana keliru," imbuhnya.

Sebelumnya, Denny juga menduga, perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun, hingga 2024 nanti sengaja dilakukan demi kepentingan politik semata. Masa jabatan Firlil Bahuri cs diperpanjang untuk memukul lawan politik.

"Makin terbaca, kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK satu tahun. Untuk menyelesaikan tugas memukul lawan-oposisi, dan merangkul kawan-koalisi, sesuai pesanan kuasa status quo," ucap Denny.

Denny mengaku tak terkejut dengan permainan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang dinilai mendukung Ganjar Pranowo, mencadangkan Prabowo Subianto, dan menolak Anies Baswedan. Denny menyebut, Jokowi menggunakan sembilan strategi 10 sempurna.

Denny merinci strategi itu, pertama yakni Jokowi dan lingkaran mempertimbangkan opsi menunda pemilu, sekaligus memperpanjang masa jabatan Presiden. Kedua sempat muncul ide mengubah konstitusi guna memungkinkan Presiden Jokowi menjabat lebih dari dua periode.

Ketiga, menguasai dan menggunakan KPK merangkul kawan dan memukul lawan politik. Keempat, menggunakan dan memanfaatkan kasus hukum sebagai political bargaining yang memaksa arah parpol dalam pembentukan koalisi pilpres.

Kelima, jika ada petinggi parpol yang keluar dari strategi pemenangan, maka beresiko dicopot dari posisinya. Keenam, menyiapkan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk antisipasi dan memenangkan sengketa hasil Pilpres 2024.

Ketujuh, tidak cukup hanya mendukung pencapresan Ganjar

Pranowo, Jokowi juga memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. "Kedelapan, Jokowi membuka opsi mentersangkakan Anies Baswedan di KPK. Ini sudah menjadi rahasia umum, terkait dugaan korupsi Formula E," kata Denny.

Kesembilan, mengambil alih Partai Demokrat melalui langkah politik yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Terakhir, yang menyempurnakan adalah dengan berbohong kepada publik. "Presiden Jokowi berulang kali mengatakan urusan capres adalah kerja para Ketum Parpol, bukan urusan Presiden. Belakangan, baru beliau akui akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024," kata Denny.

Denny menyebut satu per satu dugaannya itu mulai terbukti. Denny berharap Presiden Jokowi menghentikan cawe-cawanya, termasuk mentersangkakan dan menjegal Anies. "Kalau masih diteruskan, menjadi pertanyaan apa maksud dan tujuannya? Salah satu hipotesis yang tidak terhindar terlintas di kepala saya adalah, Presiden Jokowi justru mengundang ketidakpastian dan kegaduhan, yang ujungnya menunda pemilu, dan memperpanjang masa jabatannya sendiri. Semoga hipotesis saya keliru," Denny menandakan. (wid,rls,ist,ant,kum/dya)

DERETAN 'NYANYIAN' DENNY INDRAYANA

NGAKU PUNYA INFO A1 SOAL SISTEM PEMILU
Kontroversi Denny Indrayana bermula ketika ia mengaku mendapatkan info A1 langsung dari MK terkait sistem Pemilu 2024. Kala itu, ia sesumbar mengaku mendapatkan informasi jika Pemilu 2024 diselenggarakan dengan sistem proporsional tertutup alias pemilihan hanya dapat mencoblos partai, bukan calonnya.

BIKIN 'RAMALAN' 5 PUTUSAN MK
Denny dinilai melangkahi MK terkait informasi putusan Pemilu 2024. Bahkan pengakuannya mendapat info A1 dari MK sampai-sampai membuat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) sekaligus eks Hakim Konstitusi Mahfud MD 'turun gunung' dan mengarahkan kepolisian untuk mengusut Denny. Tak kapok, Denny membeberkan bahwa ada 5 kemungkinan keputusan yang dikeluarkan MK terkait Pemilu 2024. Salah satu dari keputusan tersebut adalah menyetujui permohonan terkait sistem Pemilu 2024 dilakukan secara proporsional tertutup.

SEBAR RUMOR ANIES BAKAL BERNASIB JADI TERSANGKA KPK

Denny kini semakin menjadi-jadi dan menyebarkan rumor miring terhadap Anies Baswedan. Denny mengaku bahwa dirinya punya informasi bahwa tak lama lagi Anies bakal dikenakan rompi oranye KPK alias menjadi tersangka. Wakil Menteri Hukum dan HAM ini kedapatan menulis sebuah surat terbuka pada Rabu (21/6/2023) yang berisikan klaimnya bahwa KPK telah menaruh Anies di dalam radar mereka. Denny menuding bahwa Anies tak lama lagi akan diusut terkait dugaan kasus korupsi Formula E. Denny turut menegaskan ia tak seorang diri mendapat info tersebut, lantaran ada Feri Amsari dan Zainal Arifin Mochtar yang turut me-nyebarkan narasi miring itu. Tak cukup di situ, Denny juga berani menuding bahwa dugaan kasus korupsi itu adalah upaya Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk menjegal Anies.



JAKARTA-Kabar baik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengumumkan pencabutan status pandemi COVID-19. Kini, Indonesia memasuki masa endemi. Mengingat virus masih ada, apakah vaksinasi dan biaya perawatan terinfeksi corona menjadi berbayar?

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan dr Siti Nadia Tarmizi menyebutkan pemerintah masih mengkaji kebijakan baru pasca pencabutan status 'pandemi' COVID-19. Salah satunya terkait kemungkinan vaksinasi berbayar. "Masih dalam pembahasan ya skema pembiayaan COVID-19 ke depan," terang dr Nadia Rabu (21/6/2023).

Wacana vaksinasi berbayar sempat disinggung Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, disebutnya bakal berlaku saat Indonesia memasuki fase endemi. Vaksin COVID-19 bisa diakses masyarakat di sejumlah apotek dengan kisaran harga tidak melampaui Rp 200 ribu.

Namun, untuk penerima bantuan iuran, vaksinasi COVID-19 dipastikan masih ditanggung pemerintah. "Dan itu hanya vaksin dalam negeri, sedangkan vaksin yang lainnya akan kita masukkan vaksinasi rutin saja seperti vaksinasi influenza, jadi toh harganya berkisar antara 5 sampai 10 dolar," terang Menkes dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (24/1/2023) lalu.

"10 dolar kan artinya masih di bawah 200 ribu, jadi untuk yang non PBI masyarakat nanti akan kita bisa membeli vaksinnya sendiri dari apotek-apotek," lanjut Menkes.

Terpisah, Asisten Deputi Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan Agustian Fardianto menyatakan, pihaknya tengah mempersiapkan mekanisme pengobatan Covid-19 di fase endemi mendatang.

Terkait mekanismenya, BPJS Kesehatan masih akan mempersiapkan bersama Kementerian Kesehatan dan pihak terkait mengenai regulasinya. "Akan kami persiapkan bersama kementerian atau lembaga terkait apabila regulasinya sudah ada," kata dia Selasa (20/6/2023).

Ardi mengatakan, BPJS Kesehatan siap menjalankan segala regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk dalam hal penjaminan biaya pelayanan kesehatan peserta BPJS Kesehatan yang terkena Covid-19. "Banyak hal yang perlu dikoordinasikan bersama. Misalnya, dari sisi peserta, diperlukan mekanisme agar penjaminan Covid-19 bagi pasien BPJS Kesehatan bisa berjalan dengan lancar," jelasnya.

Mengacu pada komitmen BPJS Kesehatan dalam menerapkan transformasi mutu layanan, peserta BPJS Kesehatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan dengan makin mudah, makin cepat, dan semua setara. "Kemudian dari sisi fasilitas kesehatan, diperlukan juga mekanis-

STATUS PANDEMI COVID-19 RESMI DICABUT PERAWATAN DAN VAKSINASI BERBAYAR?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengumumkan pencabutan status pandemi COVID-19 secara resmi melalui Youtube Setpres, Rabu (21/6/2023). (tangkap layar)



me pembayaran yang ideal, supaya pihak fasilitas kesehatan dapat mengajukan klaim dengan lancar," tandas Ardi.

Ada 161 Ribu Kematian

Pandemi COVID-19 menyisakan luka bagi banyak orang di Indonesia. Ada banyak keluarga yang ditinggalkan orang terkasih akibat virus tersebut. Kini, pemerintah telah mencabut status pandemi yang sudah lama melanda Tanah Air.

"Setelah tiga tahun lebih kita berjuang bersama menghadapi pandemi COVID-19, sejak hari ini Rabu, 21 Juni 2023, pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi," ucap Jokowi melalui Youtube Setpres, Rabu (21/6/2023).

Berdasarkan data covid19.go.id, total kasus positif corona di Indonesia per 21 Juni 2023 mencapai 6.811.330 kasus. Sebanyak 161.848 orang di antaranya meninggal dunia. Sementara 6.640.002 orang lagi menjadi penyintas dari wabah tersebut.

Kasus COVID-19 pertama di Indonesia diumumkan pada 2 Maret 2020. Kala itu, Presiden Jokowi yang didampingi Menkes Terawan menyebut ada dua kasus yang terdeteksi di Depok. Keduanya adalah seorang ibu dan putrinya. Sang ibu berusia 64 tahun sementara sang putri berusia 31 tahun.

Pemerintah saat itu berkeyakinan kasus ini muncul setelah kasus nomor satu tertular dari perempuan asal Jepang. Perempuan tersebut sebelumnya datang dari Malaysia saat mereka berada di acara sosial di Jakarta.

Di awal-awal pandemi, kasus corona di Indonesia perlu waktu 331

hari (2 Maret 2020 - 26 Januari 2021) untuk mencapai 1 juta kasus. Bila dirata-ratakan, pertumbuhan kasus saat itu mencapai 147 pasien per jam. Selanjutnya, penularan virus makin hari makin cepat. Data menunjukkan bahwa butuh 146 hari (27 Januari - 21 Juni 2021) agar kasus akumulatif mencapai 2 juta. Bila dirata-ratakan, pertumbuhan kasus saat itu mencapai 285 pasien per jam.

Sejumlah varian baru corona lalu terus bermunculan. Salah satunya adalah varian Delta yang dinilai berbahaya dan cepat menular. Total kasus positif pun tembus 3 juta hanya dalam kurun waktu 31 hari (22 Juni 2021 - 22 Juli 2021). Bila dirata-ratakan, pertumbuhan kasus saat itu mencapai 1.344 pasien per jam.

Kasus penularan corona lalu semakin menggila. Butuh waktu 33 hari lagi (23 Juli 2021 - 24 Agustus 2021) agar kasus akumulatif mencapai 4 juta. Bila dirata-ratakan, pertumbuhan kasus saat itu mencapai 1.262 pasien per jam. Kala itu, kenaikan kasus positif corona akibat gelombang varian Delta membuat Indonesia kewalahan. Tempat tidur rumah sakit (BOR) penuh, tabung oksigen langka, angka kematian bahkan mencapai 2 ribu pasien dalam 1 x 24 jam.

Di pertengahan 2021, butuh waktu 178 hari (25 Agustus 2021 - 17 Februari 2022) agar kasus akumulatif mencapai 5 juta. Bila dirata-ratakan, pertumbuhan kasus kali ini mencapai 234 pasien per jam. Puncak kasus corona tertinggi di Indonesia ada pada 16 Februari 2022 dengan penambahan kasus positif 64.178 dalam sehari.

Kasus positif corona lalu terus melandai hingga Mei 2022. Vaksinasi yang sudah dimulai menjadi faktor kunci dari berkurangnya kasus positif

dan kasus kematian. Meski begitu, kasus positif sempat naik turun di sepanjang pertengahan hingga akhir 2022. Baru kemudian pada 2023, kasus relatif landai dan terkendali. Per 20 Juni 2023, kasus positif harian ada di angka 70-an kasus per hari. Sementara kasus kematian ada di angka 1 atau 2 kasus dalam sehari. (wid,rls,ant,ist/dya)

SITUASI COVID-19 DI INDONESIA

6.811.444

Konfirmasi

6.640.216

Sembuh

161.853

Meninggal

203.859.914

Vaksinasi Ke-1

174.919.968

Vaksinasi Ke-2

69.002.090

Vaksinasi Ke-3

Update 21 Juni 2023

